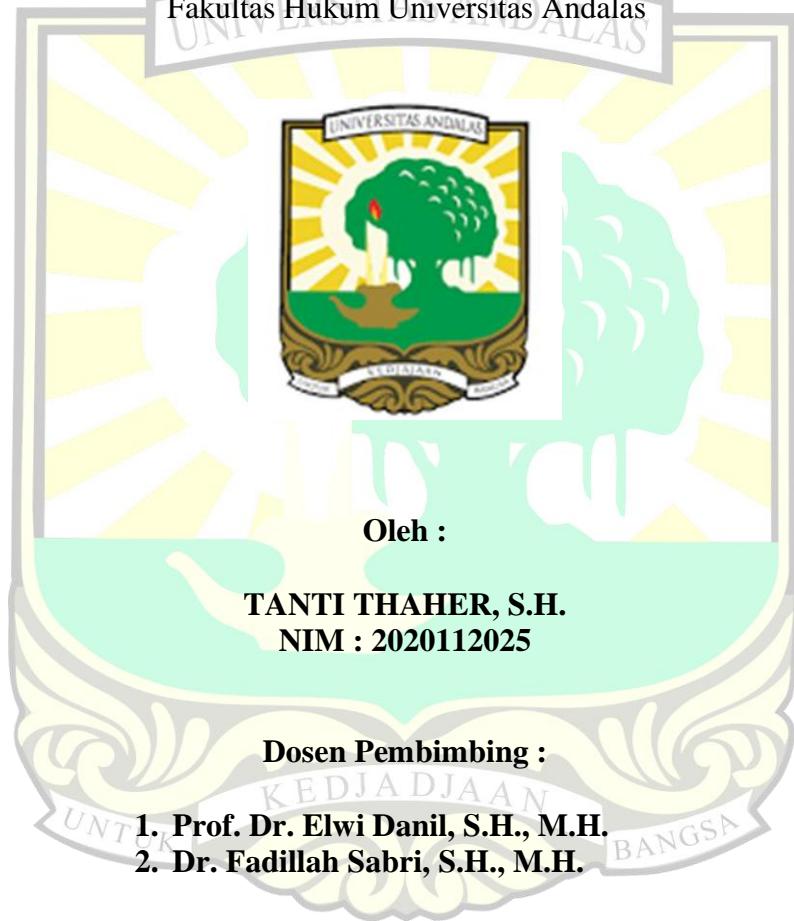


TESIS

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANG PANJANG**

**Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2022**

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020

Tanti Thaher, SH., 2020112025, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 146 Halaman, Tahun 2022, Pembimbing: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH., dan Dr. Fadillah Sabri SH., MH.

Abstrak

Sampai saat ini penjatuhan sanksi pidana masih dipandang sebagai solusi terbaik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, tidak terkecuali terhadap para pelaku “anak yang berkonflik dengan hukum” (ABH). Dilihat dari beberapa segi, penjatuhan sanksi pidana tersebut terkadang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang memadai. Termasuk juga adanya penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim, yang dikenal dengan istilah disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*), sebagai salah satu bentuk perwujudan dari diskresi melalui independensi yang dimiliki oleh hakim saat mengadili dan menangani suatu perkara. Adanya disparitas pemidanaan membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana pada kasus perkara penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Tahun 2019, diketahui bahwa satu orang dari tujuh belas orang anak pelaku yang diadili dijatuhi pidana penjara (meskipun memiliki peran yang paling kecil/ringan), sementara enam belas orang anak lainnya dijatuhi pidana bersyarat/percobaan, padahal mereka memiliki peranan yang jauh lebih signifikan sehingga menyebabkan anak korban meninggal dunia. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa dokumen terkait perkara anak dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas pemidanaan dan akibat hukum yang timbul khususnya bagi anak (pelaku). Ditemukan bahwa selain karena faktor subjektif hakim yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan ketidaktelitian hakim dalam memeriksa perkara, tidak diimplementasikannya SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung juga turut menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara dimaksud. Dampak negatif dari penerapan disparitas pidana bagi terpidana adalah munculnya rasa diperlakukan tidak adil oleh hakim, sementara masyarakat secara luas memunculkan kecemburuhan sosial dari masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Diharapkan pengawasan terhadap penerapan SEMA No. 7 Tahun 2012 dapat lebih dimaksimalkan sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas pidana yang merugikan terdakwa dikemudian hari.

Kata Kunci: Disparitas pemidanaan, Diskresi Hakim dan Asas Kebebasan Hakim

DISPARITY OF SENTENCING IN VIOLENT CRIMES WHICH WAS CARRIED OUT BY CHILD DEFENDANT IN THE JURISDICTION OF PADANG PANJANG DISTRICT COURT :

Case Study: The Verdict of the Supreme Court No. 957 K/Pid.Sus/2020
and The Verdict of the Supreme Court No: 968 K/Pid.Sus/2020

Tanti Thaher, SH., 2020112025, Master Of Law,Law Faculty Andalas University, 146 Pages, 2022, Supervisors: Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,MH., and Dr. Fadillah Sabri SH., MH.

Abstract

Until now, criminal sentencing is still considered as the best solution in giving deterrent effect for the criminals, including for children who commit the felony. Based on several aspects, this criminal sentencing sometimes is not justified by adequate judicial consideration, including also the existence of unequal or unbalanced criminal convictions by judges, which is known as "*disparity of sentencing*", as one of the forms an embodiment of independence discretion owned by a judge when they handle criminal cases. This disparity brings its own problems in law enforcement in Indonesia. As it happened in the case of the persecution that occurs in cases in Nurul Ikhlas Islamic Boarding Schools in 2019, it was discovered that one of the seventeen juveniles was given imprisonment on a trial, even though he played the minor role in the incident of the persecution, meanwhile the other sixteen juveniles were only given conditional sentences, even though they have more significant roles in causing the death of the victim. The type of the research in this thesis is juridical normative law research, by using secondary data in the form of related documents. The aims of the research are to reveal the basic consideration of the judges in passing the difference criminal decisions and the law consequences especially for the child defendant. It was found that, this disparity of sentencing is occurred not only because the subjective point of view of the judges (which are affected by the judge's knowledge and the judge's inaccuracy in examining the case), but also because of unimplemented of the Circular Letter of the Supreme Court No. 7/2012 about Legal Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court, by the registrar young special crimes to the supreme court. The negative impacts of the application of this criminal disparity for the defendant is the emergence of the sense of unfairness treated by a judge, meanwhile for public community is bringing up a social jealousy of the community in judicial institutions, which are then be reflected in the form of indifference on law enforcement in the community. It is expected that supervision against the implementation of the Circular Letter of the Supreme Court No. 7/2012 could be more maximized, as to prevent the occurrence of disparity criminal sentences which might put the defendant as the lost party in law enforcement process.

Key Words: Disparity of Sentencing; The Discretion; The Professional Freedom Principle of The Judges